



LKj

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

2016

Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan good governance.

Banjarmasin, 31 Maret 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin

Totok Agus Daryanto, M.Pd
Pemula Tk.I (IV/b)

NIP. 19670814 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	3
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	10
2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	11
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	22
2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir	35
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	43
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	45
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	47

6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.....	47
7.	Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2016	48
B.	Realisasi Anggaran	51
BAB IV	53
PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran	22
Tabel 3. 2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3. 3 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.1	23
Tabel 3. 4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2	24
Tabel 3. 5 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1	25
Tabel 3. 6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2	27
Tabel 3. 7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3	29
Tabel 3. 8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.1	30
Tabel 3. 9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.2	31
Tabel 3. 10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.3	31
Tabel 3. 11 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.1	32
Tabel 3. 12 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.2	32
Tabel 3. 13 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.3	33
Tabel 3. 14 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.4	33
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir	35
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target RPJMD Tahun 2016.....	43
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional.....	45
Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2016	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Realisasi dan Capaian Kelulusan SD	36
Grafik 3. 2 Realisasi dan Capaian Kelulusan SMP	37
Grafik 3. 3 Realisasi dan Capaian Kelulusan SMA/SMK.....	37
Grafik 3. 4 Realisasi dan Capaian APK SD	38
Grafik 3. 5 Realisasi dan Capaian APK SMP	38
Grafik 3. 6 Realisasi dan Capaian APK SMA/SMK.....	39
Grafik 3. 7 Realisasi dan Capaian APM SD.....	40
Grafik 3. 8 Realisasi dan Capaian APM SMP	40
Grafik 3. 9 Realisasi dan Capaian APM SMA/SMK	41
Grafik 3. 10 Realisasi dan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	42
Grafik 3. 11 Perbandingan APK PK 2016 dengan Target RPJMD 2016	44
Grafik 3. 12 Perbandingan APM PK 2016 dengan Target RPJMD 2016	44
Grafik 3. 13 Perbandingan APK PK 2016 dengan Data PDSPK.....	45
Grafik 3. 14 Perbandingan APM PK 2016 dengan Data PDSPK	46

1.1 Data Umum Organisasi

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan Fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek

keuangan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tema Strategis pada periode 2016 – 2021 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar serta otonomi daerah yang semakin dewasa.

Maksud dan Tujuan penyusunan LKj Pendidikan Kota Banjarmasin adalah :

1. Memberikan gambaran program kerja dan rencana kinerja yang akan dicapai, hambatan dan standar pelayanan.
2. Memenuhi asas *pelayanan prima* kepada masyarakat dalam penanganan bidang pendidikan.
3. Sebagai standar Kinerja Instansi Pemerintah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Ruang lingkup penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meliputi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin. Pembinaan dan pelayanan pendidikan itu baik yang berbasis sekolah maupun yang berbasis masyarakat. Perencanaan Pembangunan Pendidikan ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.



Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan

informasi untuk keperluan perencanaan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari pemda, BPS, Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam Perencanaan pembangunan bidang pendidikan seperti perencanaan di tingkat kota Banjarmasin diperlukan data dan informasi yang lengkap tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu di kaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasi dan komunikasi. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan.

Untuk mengatasi masalah di atas yang cukup komprehensif di kota Banjarmasin dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan proses Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam proses perencanaan Pembangunan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui

kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan, mutu dan relevansi, serta Akuntabilitas dan Citra Publik. Berdasarkan masalah yang ada, maka dilakukan analisis untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

Tujuan umum disusunnya Perencanaan Pembangunan Pendidikan adalah menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data non-pendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan. Dimana tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di kota Banjarmasin.

Untuk Menjalankan seluruh program dan kegiatan bidang pendidikan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2008 bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Program
3. Bidang PAUD dan PNFI, membawahi :
 - Seksi PAUD
 - Seksi Dikmas, Kursus dan Kelembagaan

- Seksi Ketenagaan
- 4. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Sarana Prasarana dan perpustakaan
 - Seksi Kesiswaan dan Prestasi
- 5. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Sarana Prasarana dan perpustakaan
 - Seksi Kesiswaan dan Prestasi
- 6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi Pengembangan Profesi
 - Seksi Pembinaan TK dan SD
 - Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Jabatan Fungsional

1.4 Landasan Hukum

LKj Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 529 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka menunjang akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terlebih dahulu dikembangkan Visi Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu "**KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN BAIMAN (BERTAKWA, AMAN, INDAH, MAJU, AMANAH dan NYAMAN)**"

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Banjarmasin memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Misi ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu **Mewujudkan Kota Banjarmasin Bertaqwa dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.** Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

2.1.1 VISI dan MISI

A. VISI

Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai dengan RENSTRA adalah **"Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal dan Nasional Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas dan Kompetitif"**

B. MISI

Misi yang dikembangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu:

1. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
2. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
3. Mewujudkan Pelaku Pendidikan yang Kuat
4. Mewujudkan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan Misi Kemendiknas " 5 K " yaitu:

- Misi ke 1 Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan
- Misi ke 2 Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
- Misi ke 3 Meningkatkan **Kualitas/Mutu** dan Relevansi Layanan Pendidikan
- Misi ke 4 Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- Misi ke 5 Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan

2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin telah direvisi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 529 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKTOR KINERJA
1	Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Banjarmasin	1.1	Harapan Lama Sekolah
		1.2	Persentasi Kelulusan UAN
2	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang bermutu di Kota Banjarmasin	2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)
		2.2	Angka Partisipasi Murni (APM)
		2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah
3	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Banjarmasin	3.1	Persentasi Guru Bersertifikat Pendidik
		3.2	Guru yang lulus UKG dengan nilai 80
		3.3	Persentasi Guru Lulus UKG
4	Peningkatan Sumber Tata Kelola yang transparan dan Akuntabel	4.1	Meningkatnya layanan PAUD dan Dikmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA
		4.2 Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar
		4.3 Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan
		4.4 Persentasi Pencapaian Akreditasi A Sekolah

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis periode 2016-2021 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016.

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja (PK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Banjarmasin	1.1 Harapan Lama Sekolah	14,03	%
		1.2 Persentasi Kelulusan		
		- SD/MI	100,00	%
		- SMP/MTs	99,25	%
		- SMA/SMK/MA	99,98	%
2	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang bermutu di Kota Banjarmasin	2.1 Angka Partisipasi Kasar		
		- SD/MI	120,00	%
		- SMP/MTs	99,00	%
		- SMA/SMK/MA	67,00	%
		2.2 Angka Partisipasi Murni		
		- SD/MI	114,00	%
		- SMP/MTs	89,00	%
		- SMA/SMK/MA	65,00	%
		2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,65	Th
3	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Banjarmasin	3.1 Persentasi Guru bersertifikat pendidik	60	%
		3.2 Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	10	%
		3.3 Persentasi Guru lulus UKG	70	%
4	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	4.1 Meningkatnya Layanan PAUD dan Dikmas	4	Sekolah
		4.2 Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar	75	%
		4.3 Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan	20	%
		4.4 Persentasi Pencapaian Akreditasi A Sekolah		
		- SD	40	%
		- SMP	75	%

Untuk mewujudkan agenda kerja pemerintah daerah, maka perlu dituangkan dalam suatu wadah yang lebih mempertegas agenda tersebut yakni dalam bentuk program dan kegiatan. Program Pemerintah Kota Banjarmasin pada hakekatnya merupakan

implementasi dari visi dan misi serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja dalam menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Adapun program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016 ditinjau berdasarkan bidang pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan : Meningkatkan peran Aparatur Pendidik agar dapat mencapai pelayanan pendidikan yang lebih baik.
Sasaran : Tercapainya pelayanan pendidikan dengan adanya aparatur pendidik yang handal dan terampil

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
- b. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Inventaris Barang dan Aset Daerah

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan : Meningkatkan aspek penatausahaan sarana di bidang aparatur
Sasaran : Tercapainya peningkatan mutu dan kualitas tentang peran serta Aparatur pendidik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Tujuan : Memperluas akses pendidikan bagi anak usia pra sekolah (3-6 tahun) yang belum terlayani melalui jalur pendidikan PAUD dan TK
Sasaran : Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan usia pra sekolah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
 - b. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
 - c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Penyelenggaraan Paket A, B dan C
 - f. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
 - g. Manajemen Penyelenggaraan BOP PAUD
4. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Tujuan : Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah (7-15 tahun) untuk landasan WAJAR 9 tahun (Wajib Belajar 9 tahun)
- Sasaran : Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan usia sekolah (7-15 tahun) bagi seluruh lapisan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
- b. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- c. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
- d. Pengadaan Mebeluer Sekolah
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- h. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
- i. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
- j. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- k. Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Dasar
- l. Pembangunan Pagar Sekolah
- m. Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah
- n. Pengadaan Lomba-Lomba
- o. Kegiatan Operasional Sekolah SD dan SMP
- p. Penyediaan Dana BSM untuk jenjang SD dan SMP

- q. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
 - r. Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
 - s. Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)
5. Program : Pendidikan Menengah
- Tujuan : Memperluas akses pendidikan sekolah menengah sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal
- Sasaran : Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan menengah sesuai dengan tuntutan pasar kerja

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
 - b. Pengadaan Mebeluer Sekolah
 - c. Peningkatan Pembinaan Kreativitas dan Perpustakaan Kesiswaan
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP)
 - e. Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Menengah
 - f. Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP, SMA dan SMK
 - g. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA)
 - h. Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga Untuk Pendidikan Menengah
 - i. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
 - j. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - k. Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMA/SMK
6. Program : Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Tujuan : Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam menghadapi persaingan global
- Sasaran : Terlaksananya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk memenuhi Standar Kompetensi

- b. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
 - c. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program DIKLAT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
 - e. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program : Manajemen pelayanan pendidikan
- Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan yang prima dengan tersedianya data yang akurat dan akuntabel
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen pelayanan pendidikan yang prima, akurat dan akuntabel
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
 - b. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
 - c. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
8. Program : Pendidikan Non Formal
- Tujuan : Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk usia 15-44 tahun melalui keterampilan dan kecakapan hidup yang relevan
- Sasaran : Mengoptimalkan fasilitas pendidikan non formal sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal
 - b. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
 - c. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
 - d. Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup
 - e. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
 - f. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam mewujudkan apa yang menjadi Misi seperti tercantum pada RPJMD Kota Banjarmasin yaitu *“Mewujudkan Kota Banjarmasin Bertaqwa dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera”* mendapat pagu anggaran sebesar Rp68.252.844.000 dengan 8 Program Kegiatan adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

NO	PROGRAM	NILAI DPA Rp
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.289.293.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.661.828.500
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.636.152.500
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	45.782.270.000
5	Program Pendidikan Menengah	3.826.534.000
6	Program Pendidikan Non Formal	940.900.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.982.905.000
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.132.961.000
Jumlah		68.252.844.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2016 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. IKU spesifik dan jelas (Spesific)
- b. IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
- c. IKU dapat dicapai (Achievabel)
- d. IKU menggambarkan hasil (Relevance)
- e. IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2016, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian di analisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2016. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	$x > 85\%$	Sangat berhasil
II	$70\% \leq x \leq 85\%$	Berhasil
III	$55\% \leq x \leq 70\%$	Cukup Berhasil
IV	$x \leq 55\%$	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran

NO	INDIKTOR KINERJA	TARGET		Realisasi		Capaian
1	2	3		4		5
1	1.1 Harapan Lama Sekolah	14,03	Tahun	13,76	Tahun	98,08%
	1.2 Persentasi Kelulusan					
	- SD/MI	100,00	%	100,00	%	100,00%
	- SMP/MTs	99,25	%	100,00	%	100,76%
	- SMA/SMK/MA	99,98	%	95,39	%	95,41%
2	2.1 Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI	120,00	%	126,52	%	105,44%
	- SMP/MTs	99,00	%	97,77	%	98,75%
	- SMA/SMK/MA	67,00	%	94,59	%	141,18%
	2.2 Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI	114,00	%	115,02	%	100,89%
	- SMP/MTs	89,00	%	79,98	%	89,87%

NO	INDIKTOR KINERJA	TARGET		Realisasi		Capaian
	- SMA/SMK/MA	65,00	%	82,11	%	126,32%
	2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,65	Tahun	9,98	Tahun	93,71%
3	3.1 Persentasi Guru bersertifikat pendidik	60	%	49,30	%	82,17%
	3.2 Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	10	%	4,38	%	43,80%
	3.3 Persentasi Guru lulus UKG	70	%	54,68	%	78,11%
4	4.1 Meningkatnya Layanan PAUD dan Dikmas	4	Sekolah	2	Sekolah	50,00%
	4.2 Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar	75	%	69,44	%	92,59%
	4.3 Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan	20	%	20,8	%	104,00%
	4.4 Persentasi Pencapaian Akreditasi A					
	- SD	40	%	45,56	%	113,90%
	- SMP	75	%	67,69	%	90,25%
Rata-rata Capaian Sasaran						95,01%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 95,01 persen, maka berdasarkan kategorisasi pencapaian kinerja dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "Sangat Berhasil". Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1) Harapan Lama Sekolah

Tabel 3. 3 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Harapan Lama Sekolah	14,03	Tahun	13,76	Tahun	98,08%
Rata-rata Capaian					98,08%

* Angka Prakiraan sumber BPS

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas adalah dengan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat dan membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 24 PKBM yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

2) Persentasi Kelulusan UAN

Tabel 3. 4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Peresentasi Kelulusan UAN					
- SD	100	%	100	%	100
- SMP/MTs	99,25	%	100	%	100,71
- SMA/SMK	99,98	%	95,39	%	95,41
Rata-rata capaian					98,72

Pada tahun 2016 Kelulusan masih belum bisa 100 persen untuk Kota Banjarmasin tingkat kelulusan rata-rata yang hanya mencapai 98,72%, Hal ini disebabkan pada jenjang SMA/SMK tingkat kelulusannya masih belum mencapai 100%. Diharapkan pada tahun

berikutnya tingkat kelulusan di Kota Banjarmasin sudah mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan, dimana Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab urusan pendidikan bisa meningkatkan



kualitas pendidikan baik itu dalam prestasi akademik maupun prestasi diluar akademik. Peningkatan kualitas tersebut erat kaitannya dengan segala persiapan sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan mengadakan Try Out secara berkala, peningkatan mutu sekolah dan semakin banyaknya siswa yang mau datang ke perpustakaan Sekolah dengan semakin lengkapnya penyediaan buku referensi pembelajaran.

3) Angka Partisipasi Kasar

Tabel 3. 5 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka partisipasi kasar					
- SD	120	%	126,52	%	105,44
- SMP/MTs	99	%	97,77	%	98,75
- SMA/SMK	67	%	94,59	%	141,18
Rata-rata capaian					115,12

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan pada tabel diatas, rata – rata capaian angka partisipasi kasar adalah 115,12%, dimana realisasi sudah melebihi target Perjanjian Kinerja kecuali untuk jenjang SMP yang hanya mencapai 97,77%, 1,23% lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang

diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SD adalah sebagai berikut :

$$\text{APK SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SD+MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SD/MI} = \frac{84.419}{66.722} \times 100\%$$

$$\text{APK SD/MI} = 126.52 \%$$

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SMP adalah sebagai berikut :

$$\text{APK SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SLTP+MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 12-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP/MTs} = \frac{32.896}{33.648} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP/MTs} = 97,77 \%$$

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SMA adalah sebagai berikut :

$$\text{APK SMA/SMK/MA} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA+SMK+MA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMA/SMK/MA} = \frac{29.819}{31.524} \times 100\%$$

$$\text{APK SMA/SMK/MA} = 94,59 \%$$

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikkan angka partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas,

penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan BSNP untuk jenjang pendidikan menengah. Proses penerimaan siswa baru juga dirombak dengan melakukan system online sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Akan tetapi pada jenjang pendidikan SMP masih terdapat APK yang rendah untuk lingkup kecamatan dimana belum meratanya jumlah SMP pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

4) Angka partisipasi murni (APM)

Tabel 3. 6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka partisipasi murni					
- SD	114	%	115,02	%	100,90
- SMP/MTs	89	%	79,98	%	89,87
- SMA/MA	65	%	82,11	%	126,33
Rata-rata capaian					105,70

Angka Partisipasi Murni untuk usia sekolah tingkat SD adalah sebagai berikut :

$$APM \text{ SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SD+MI yang berusia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$APM \text{ SD/MI} = \frac{76.744}{66.722} \times 100\%$$

$$APM \text{ SD/MI} = 115.02 \%$$

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMP adalah sebagai berikut :

$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SLTP+MTs yang berusia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 12-15 tahun}} \times 100\%$$

$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{26.913}{33.648} \times 100\%$$

$$APM \text{ SMP/MTs} = 79,98 \%$$

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMA adalah sebagai berikut :

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA+SMK+MA yang berusia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = \frac{25.885}{31.524} \times 100\%$$

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = 82,11\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Jika dilihat dari table 3.6 diatas maka realisasi capaian pada setiap jenjang pendidikan sudah melebihi dari target akhir Perjanjian Kinerja APM tingkat SD yaitu 114% sedangkan realisasi APM tingkat SD yaitu 115,02% sehingga sudah melebihi target sebanyak 1,02%, sedang capaian APM pada jenjang SMP/MTs mencapai 79,97% hasil realisasi tersebut lebih rendah 10,98% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 89%, pada jenjang APM SMA/MA untuk realisasi mencapai 82,11%, yaitu 17,11% lebih tinggi dari target yang di tetapkan pada pernjian kinerja. Berhasilnya capaian kinerja pada semua jenjang pendidikan



merupakan buah kerja keras Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam menerapkan program dan kegiatan yang tepat seperti pemberian BOSDA untuk seluruh siswa tingkat SD/SMP Negeri dan Swasta, melakukan

pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP). Pada jenjang SMA kebijakan yang diambil untuk meningkatkan APM seperti pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin (BSM), menambah ruang kelas baru, penambahan fasilitas sekolah seperti pengadaan ruangan laboratorium (TIK, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa), perpustakaan dan pembuatan jalan untuk akses ke sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Bina Marga.

5) Angka rata – rata lama sekolah

Tabel 3. 7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka rata – rata lama sekolah	10,65	Thn	9,98	Thn	93,71
Rata-rata capaian					93,71%

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal pada suatu daerah, tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan



jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang

pendidikan yang ditamatkannya. Kalau dilihat pada tabel diatas capaian kinerja Cuma sebesar 93,71 persen, akan tetapi realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,98 tahun sehingga belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Jika dilihat angka rata-rata lama sekolah tersebut maka di kota Banjarmasin rata-rata orang bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 SMA.

Usaha yang di lakukan Dinas Pendidikan dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Peningkatan aksesibilitas, melalui : pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), mengurangi angka putus sekolah, pendirian SMP Terbuka, serta mengefektifkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam menjaring anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapat pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.
- b. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional, termasuk dalam memahami kurikulum dan menerapkannya di kelas secara lebih baik.

6) Persentasi Guru bersertifikat pendidik

Tabel 3. 8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Persentasi Guru bersertifikat pendidik	60	%	49,30	%	82,17%
Rata-rata capaian					82,17%

Dari data diatas terlihat bahwa di Kota Banjarmasin jumlah guru yang bersertifikat pendidik masih belum mencapai target yang ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja yaitu 60% dari jumlah seluruh guru baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, hal ini disebabkan karena masih banyak guru-guru yang belum dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru atau UKG yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik, dan syarat utama untuk dapat mengikuti UKG yaitu guru tersebut harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK yang saat ini masih banyak guru Non PNS yang belum memiliki NUPTK.

7) Guru yang lulus UKG dengan nilai 80

Tabel 3. 9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Guru yang lulus UKG dengan nilai 80	10	%	4,38	%	43,80%
Rata-rata capaian					43,80%

Salah satu syarat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan sertifikasi pendidikan adalah dengan mendapatkan nilai UKG minimal 80, pada perjanjian kinerja ditetapkan target 10% dari peserta UKG mendapatkan nilai minimal 80, dan pada realisasi peserta UKG yang mendapatkan nilai 80 hanya 4,38%.

8) Persentasi Guru lulus UKG

Tabel 3. 10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 3.3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Persentasi Guru lulus UKG	70	%	54,68	%	78,11%
Rata-rata capaian					78,11%

Persentasi guru yang lulus UKG pada tahun 2016 mencapai 54,68% sehingga masih belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu sebesar 70% dari total guru yang mengikuti UKG. Sehingga capaian realisasi hanya sebesar 78,11%.

9) Meningkatnya Layanan PAUD dan Dikmas

Tabel 3. 11 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Meningkatnya Layanan PAUD dan Dikmas	4	Sekolah	2	Sekolah	50%
Rata-rata capaian					50%

Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab urusan wajib bidang pendidikan sudah melaksanakan tupoksinya dengan menjalankan strategi peningkatan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin sesuai Program dan Kegiatan yang ada. Salah satunya adalah dengan meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas yaitu dengan cara membangun PAUD terpadu pembina yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi PAUD-PAUD yang lain, pada tahun 2016 di targetkan PAUD terpadu Pembina sebanyak 4 sekolah. PAUD terpadu Pembina yang terealisasi ada sebanyak 2 Sekolah yaitu di Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur.

10) Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar

Tabel 3. 12 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar	75	%	69,44	%	92,59%
Rata-rata capaian					92,59%

Meningkatnya layanan Pendidikan Dasar ini dapat di ukur dengan cara melihat sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal atau SPM, ada 13 indikator SPM yang harus di penuhi oleh tingkat satuan pendidikan agar dapat memenuhi SPM. Dari target yang telah di ditetapkan yaitu 75% hanya ada 69,44% sekolah yang memenuhi indikator tersebut, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 92,59%.

11) Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan

Tabel 3. 13 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan	20	%	20,8	%	104,00%
Rata-rata capaian					104,00%

Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar-mengajar dan juga untuk memudahkan guru dalam mengolah dan membuat bahan ajar sehingga dapat lebih mudah untuk di sampaikan ke siswa, dengan harapan daya serap siswa terhadap materi yang diberikan lebih baik daripada penyampaian materi ajar dengan cara konvensional. Untuk target kinerja pendayagunaan TIK untuk pendidikan di tetapkan sebesar 20% dari jumlah guru yang ada di Kota Banjarmasin, dan pada realisasinya guru yang di mendapat pelatihan TIK baik dari tingkat Provinsi maupun Kota sudah mencapai 20,8%, sehingga untuk target capaian dapat mencapai 104,00%.

12) Persentasi Pencapaian Akreditasi A

Tabel 3. 14 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator 4.4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Persentasi Pencapaian Akreditasi A					
- SD	40	%	45,56	%	113,90
- SMP	75	%	67,69	%	90,25
Rata-rata capaian					102,08

Dari target yang ditetapkan di perjanjian kinerja untuk pencapaian sekolah berakreditasi A untuk SD yang di targetkan 40% dari jumlah seluruh sekolah dasar yang ada di banjarmasin pada tahun 2016 sudah ada 45,56% Sekolah Dasar yang sudah mencapai nilai akreditasi A, sedangkan untuk sekolah menengah pertama yang di

targetkan 75% dari jumlah sekolah menengah pertama yang ada di Banjarmasin, pada realisasi nya hanya mencapai 67,69% sekolah yang sudah mendapatkan akreditasi A.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian Dinas Pendidikan tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir

NO	INDIKTOR KINERJA		Realisasi					Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	1.1	Harapan Lama Sekolah					13,76					98,08%
	1.2	Persentasi Kelulusan										
		- SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%	100%	100%	100,00%
		- SMP/MTs	99,20	99,60	99,00	100,00	100,00	100%	100%	99%	100%	100,76%
	- SMA/SMK/MA	99,40	99,40	99,40	99,20	95,39	101%	101%	101%	99%	95,41%	
2	2.1	Angka Partisipasi Kasar										
		- SD/MI	105,00	105,00	104,00	126,25	126,52	100%	100%	100%	120%	105,43%
		- SMP/MTs	113,00	113,00	112,00	105,51	97,77	100%	100%	99%	93%	98,76%
		- SMA/SMK/MA	53,10	53,80	66,00	91,22	94,59	100%	102%	127%	176%	141,18%
	2.2	Angka Partisipasi Murni										
		- SD/MI	94,30	98,50	96,70	114,85	115,02	107%	112%	110%	130%	100,89%
		- SMP/MTs	79,60	82,20	82,20	98,75	79,98	101%	105%	105%	127%	89,87%
		- SMA/SMK/MA	53,10	52,80	66,00	82,09	82,11	195%	199%	260%	238%	126,32%
	2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,88	9,88	9,88	9,97	9,98	100%	99%	97%	94%	93,71%
	3	3.1	Persentasi Guru bersertifikat pendidik					49,30				
3.2		Guru yang lulus UKG dengan nilai 80					4,38					43,80%
3.3		Persentasi Guru lulus UKG					54,68					78,11%
4	4.1	Meningkatnya Layanan PAUD dan Dikmas					2					50,00%
	4.2	Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar					69,44					92,59%
	4.3	Meningkatnya Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan					20,8					104,00%
	4.4	Persentasi Pencapaian Akreditasi A Sekolah										
		- SD/MI					45,56					13,90%
	- SMP/MTs					67,69					90,25%	

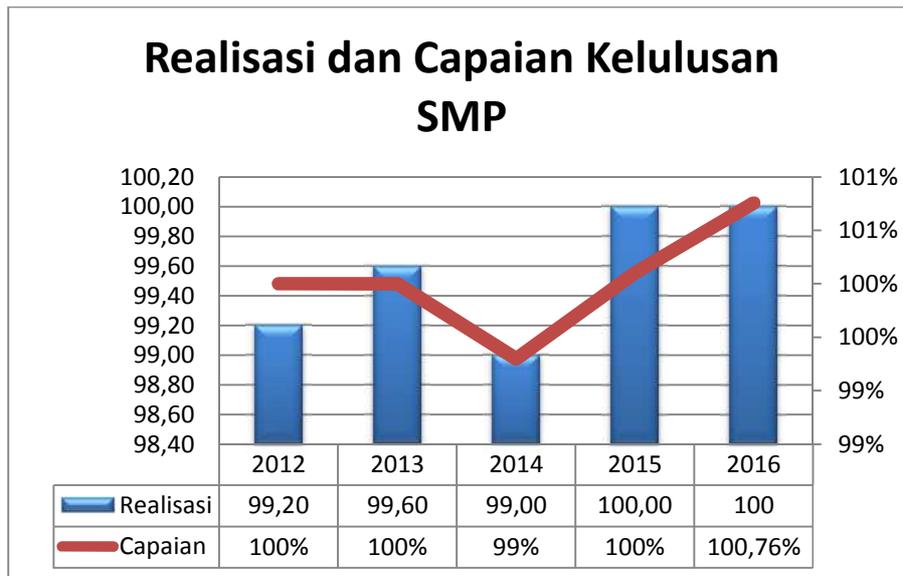
Untuk perjanjian kinerja 2016 ada mengalami perubahan jika dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga ada beberapa perjanjian kinerja yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, beberapa perjanjian kinerja yang dapat dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun-tahun yang sebelumnya adalah:

1. Persentasi kelulusan UAN



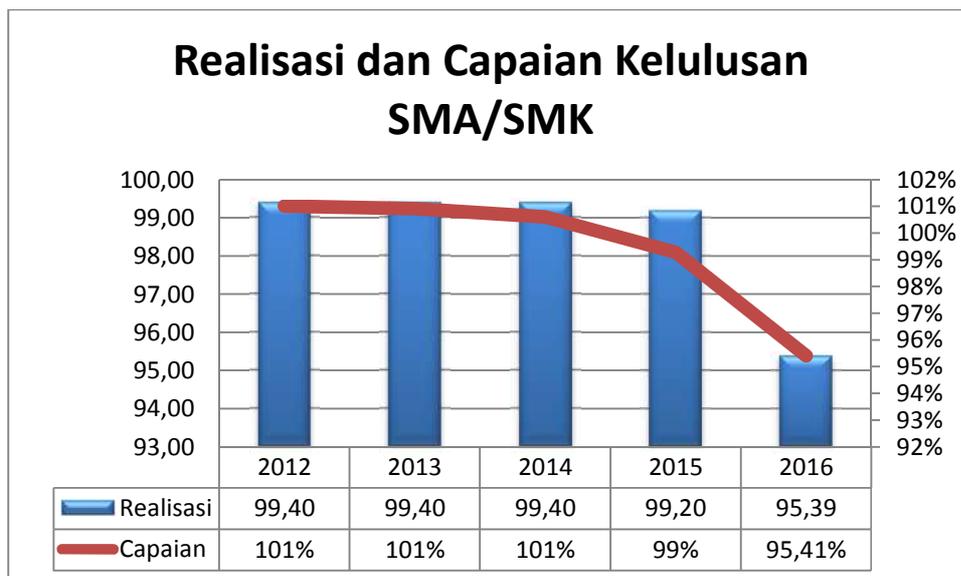
Grafik 3. 1 Realisasi dan Capaian Kelulusan SD

Dapat di lihat dari grafik diatas antara realisasi dan persen capaian kinerja untuk kelulusan SD sudah terpenuhi 100 % selama 5 tahun terakhir.



Grafik 3. 2 Realisasi dan Capaian Kelulusan SMP

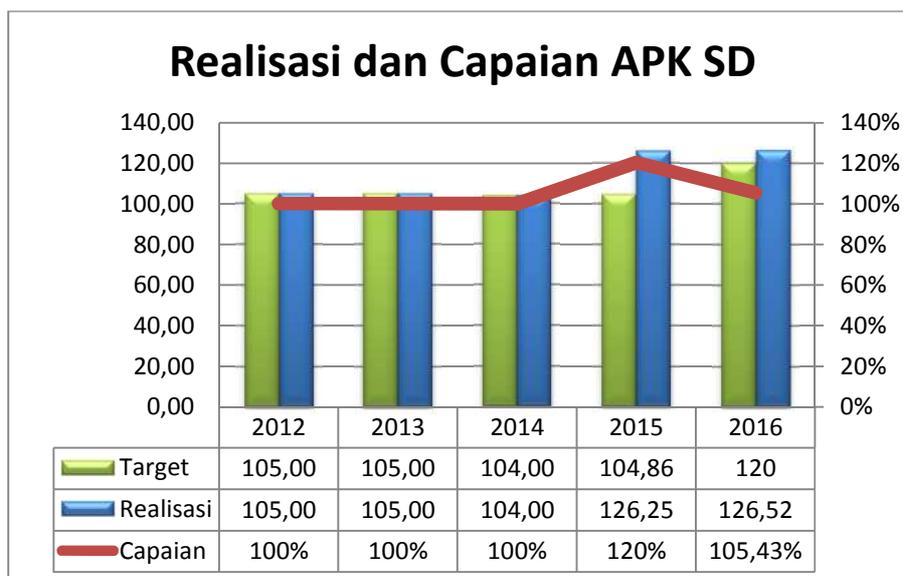
Capaian kelulusan SMP dapat dilihat dari grafik diatas untuk realisasi kinerja tahun 2016 sudah dapat mencapai 100% angka kelulusan, lebih tinggi 0,75% dari target yang di tetapkan.



Grafik 3. 3 Realisasi dan Capaian Kelulusan SMA/SMK

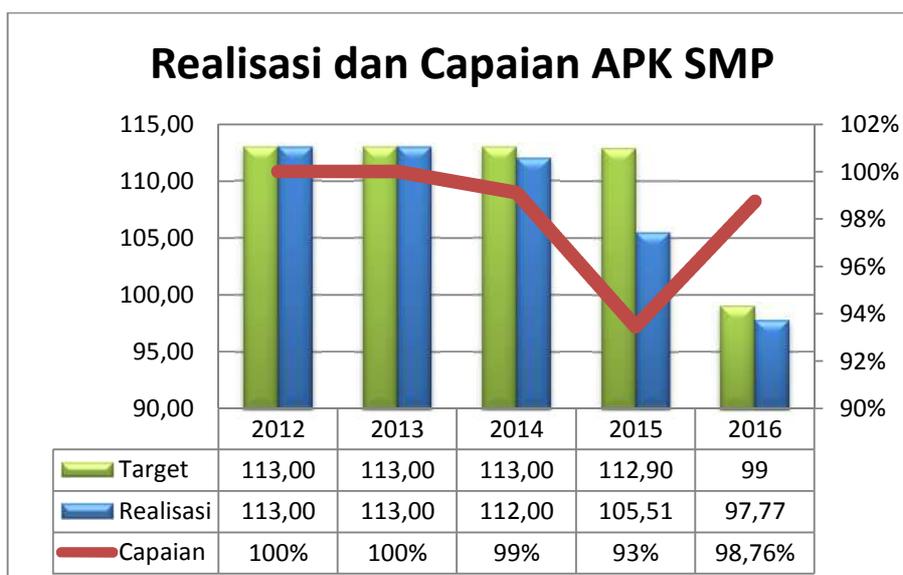
Pada grafik perbandingan realisasi dan capaian kelulusan SMA/SMK pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,81% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)



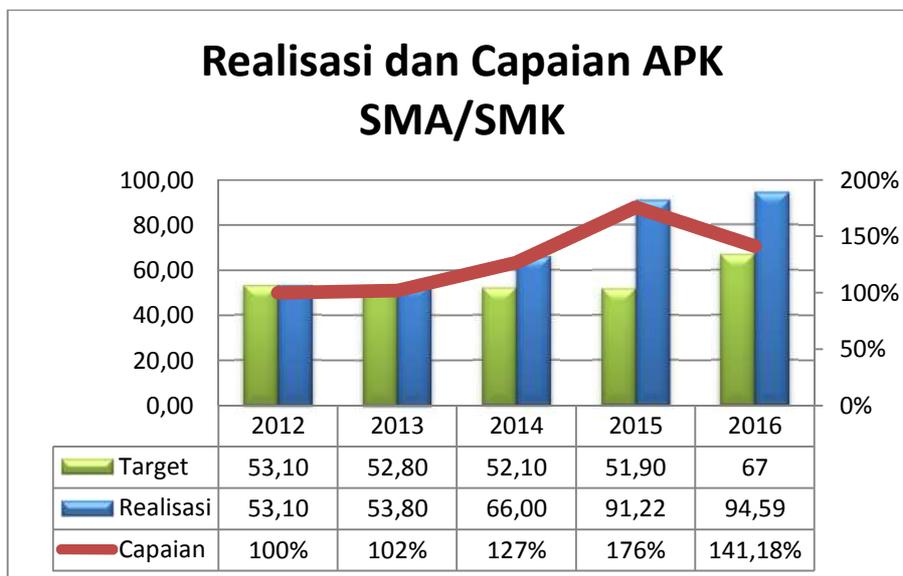
Grafik 3. 4 Realisasi dan Capaian APK SD

Pada grafik 3.4 dapat di lihat untuk tahun 2012-2013 APK SD target dapat terpenuhi 100%, sedangkan untuk tahun 2015 capaian realisasi mencapai 120%, untuk tahun 2016 terlihat terjadi penurunan pada capaian realisasi sebesar 14,52% namun hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kenaikan target capaian sebesar 15,14% sehingga terlihat target capaian turun sebesar 14,52%, jika dilihat dari realisasi APK SD mengalami kenaikan sebesar 0,27%.



Grafik 3. 5 Realisasi dan Capaian APK SMP

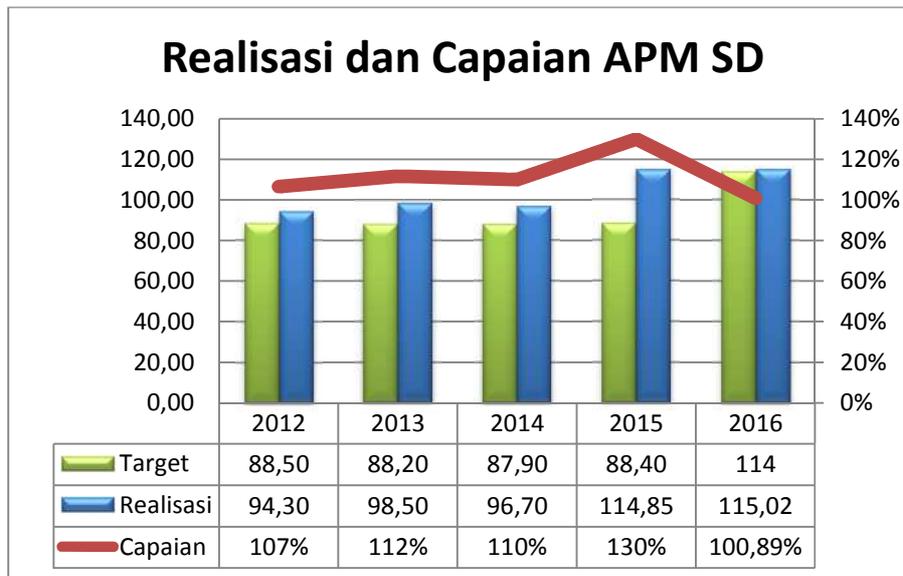
Pada grafik 3.5 dapat terlihat realisasi capaian sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 pada bagian realisasi sebesar 6,49% dan pada tahun 2016 sebesar 7,74%, namun jika kita lihat dari capaian kinerja terjadi kenaikan sebesar 5,76% jika dibandingkan pada realisasi tahun 2016.



Grafik 3. 6 Realisasi dan Capaian APK SMA/SMK

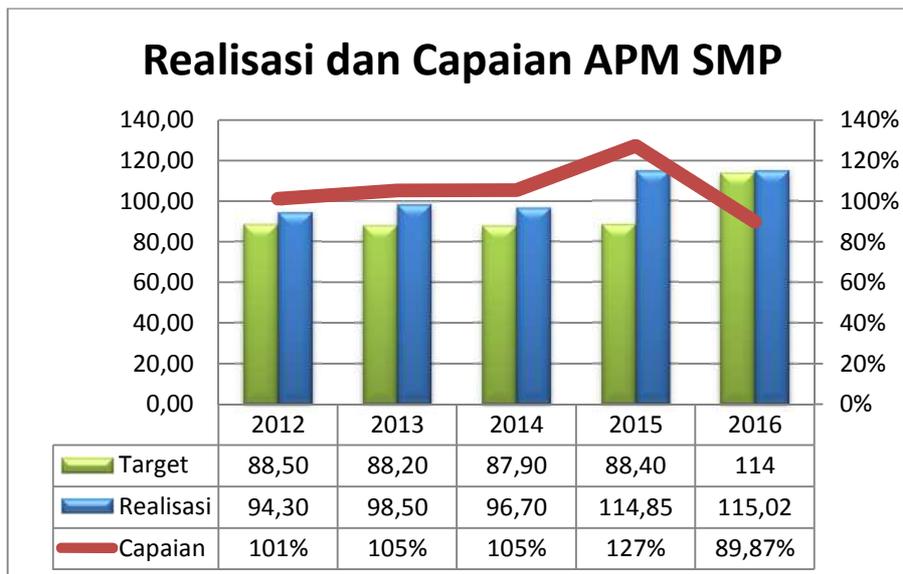
Terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2015 untuk capaian kinerja sebesar 49% jika dibandingkan dengan tahun 2014, namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan realisasi sebesar 3,37% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 walaupun untuk capaian kinerja terlihat ada penurunan sebesar 34,82%.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)



Grafik 3. 7 Realisasi dan Capaian APM SD

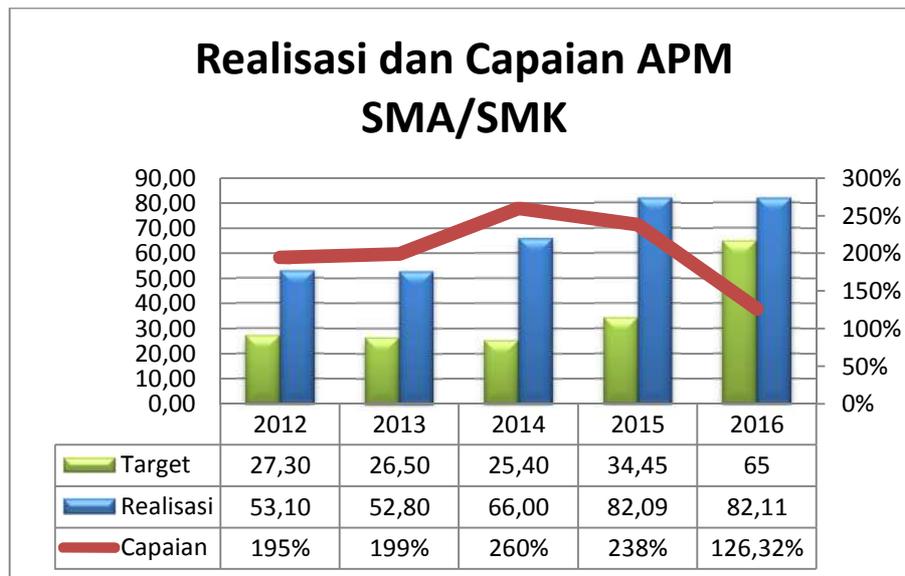
Pada tahun 2016 terlihat terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 29,11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 hal ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan target APM SD yang pada tahun 2015 sebesar 88,40% menjadi 114%. Namun jika dilihat dari realisasi terjadi kenaikan 0,17% untuk APM SD.



Grafik 3. 8 Realisasi dan Capaian APM SMP

Pada APM SMP tahun 2016 terlihat capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 37,13% jika dibandingkan dengan capaian

kinerja pada tahun 2015, namun hal ini disebabkan karena adanya perubahan target kinerja pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 25,6% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015. Jika dilihat dari realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,17% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015.



Grafik 3. 9 Realisasi dan Capaian APM SMA/SMK

Untuk realisasi APM SMA/SMK pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat pada tahun 2016 capaian kinerja turun sebesar 111,68% jika dibanding dengan capaian kinerja pada tahun 2015, namun hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kenaikan target pada tahun 2016 sebesar 30,55% sehingga berpengaruh pada capaian kinerja. Namun jika dibandingkan pada realisasi untuk tahun 2016 justru mengalami kenaikan sebesar 0,02%.

4. Angka Rata-rata lama sekolah



Grafik 3. 10 Realisasi dan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat sudah menunjukkan tren



peningkatan, walaupun sempat stagnan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pada angka 9,88 namun pada tahun 2015 meningkat kembali pada angka 9,97 tahun dan di tahun 2016 meningkat kembali sebesar 9,98 tahun.

Dinas Pendidikan perlu melakukan

kajian lebih lanjut indikator-indikator yang memiliki daya ungkit yang besar untuk mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat sehingga dapat memenuhi atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut di atas tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Peningkatan aksesibilitas, melalui : pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), mengurangi angka putus sekolah, pendirian SMP Terbuka, serta mengefektifkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam menjangkau anak tidak

sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapat pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.

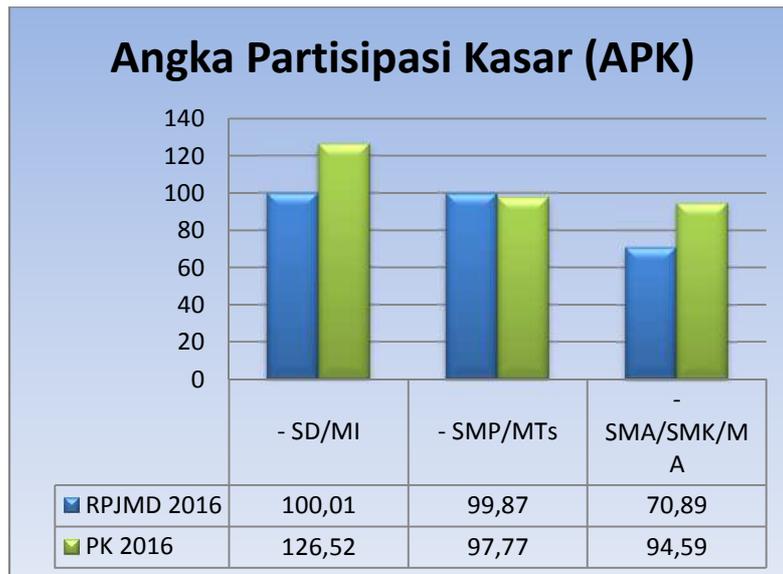
- b. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional, termasuk dalam memahami kurikulum dan menerapkannya di kelas secara lebih baik.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

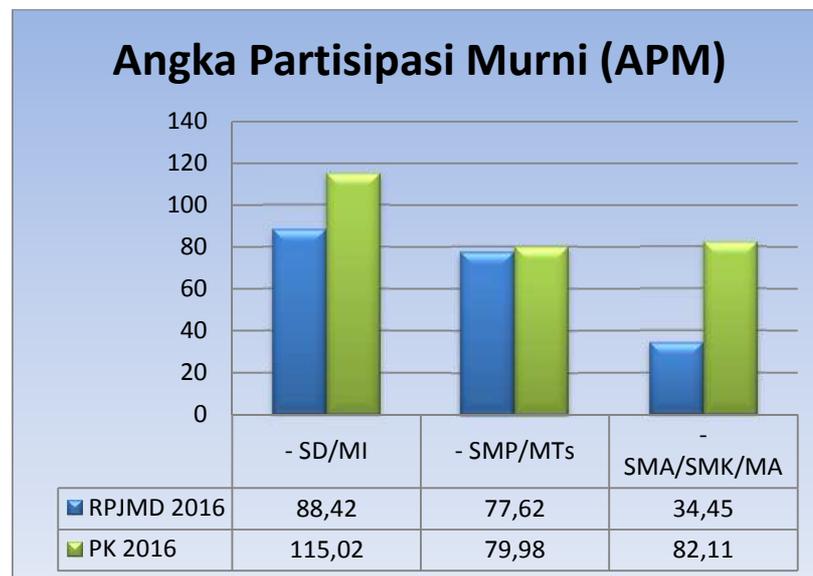
INDIKTOR KINERJA		RPJMD 2016		PK 2016	
2.1	Angka Partisipasi Kasar				
	- SD/MI	100,01	%	126,52	%
	- SMP/MTs	99,87	%	97,77	%
	- SMA/SMK/MA	70,89	%	94,59	%
2.2	Angka Partisipasi Murni				
	- SD/MI	88,42	%	115,02	%
	- SMP/MTs	77,62	%	79,98	%
	- SMA/SMK/MA	34,45	%	82,11	%

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target RPJMD Tahun 2016



Grafik 3. 11 Perbandingan APK PK 2016 dengan Target RPJMD 2016

Dapat dilihat dari grafik perbandingan APK PK 2016 dengan target RPJMD 2016 di atas bahwa realisasi APK dinas pendidikan secara keseluruhan sudah melebihi dari target RPJMD sebesar 16,03%, walaupun untuk realisasi PK 2016 jenjang SMP/MTs masih di bawah target RPJMD sebesar 2,1%.



Grafik 3. 12 Perbandingan APM PK 2016 dengan Target RPJMD 2016

Pada grafik perbandingan APM PK 2016 dengan target RPJMD 2016 dapat dilihat bahwa capaian APM pada PK 2016 memiliki selisih yang signifikan terhadap target RPJMD 2016, seperti pada jenjang SD/MI yang memiliki selisih 26,6% antara target RPJMD dan capaian PK 2016 dan jenjang SMA/SMK/MA dengan selisih 47,66%, tinggi nya

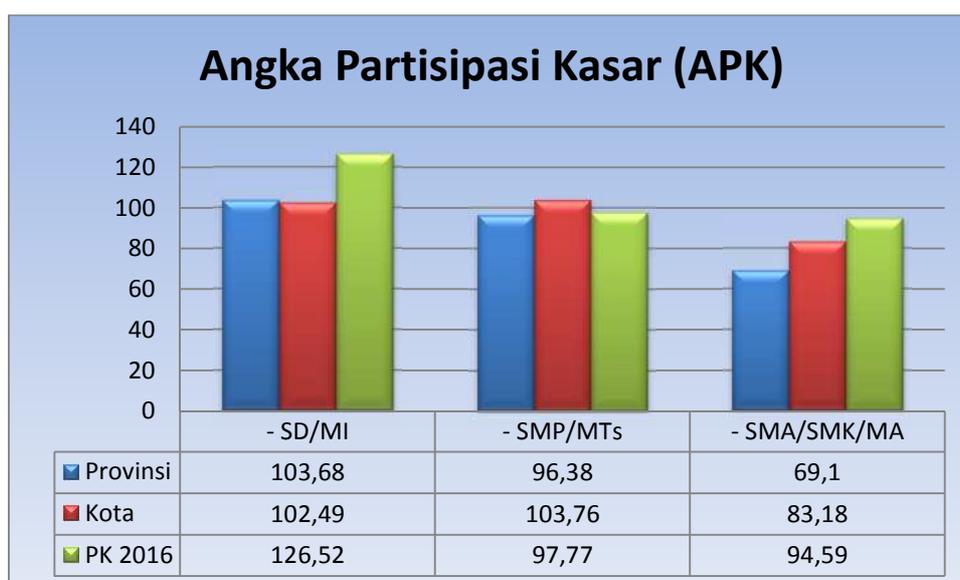
capaian APM PK 2016 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh komunitas pendidikan yang ada baik itu pegawai dinas pendidikan, guru dan pemerintah kota Banjarmasin selaku pemegang kebijakan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

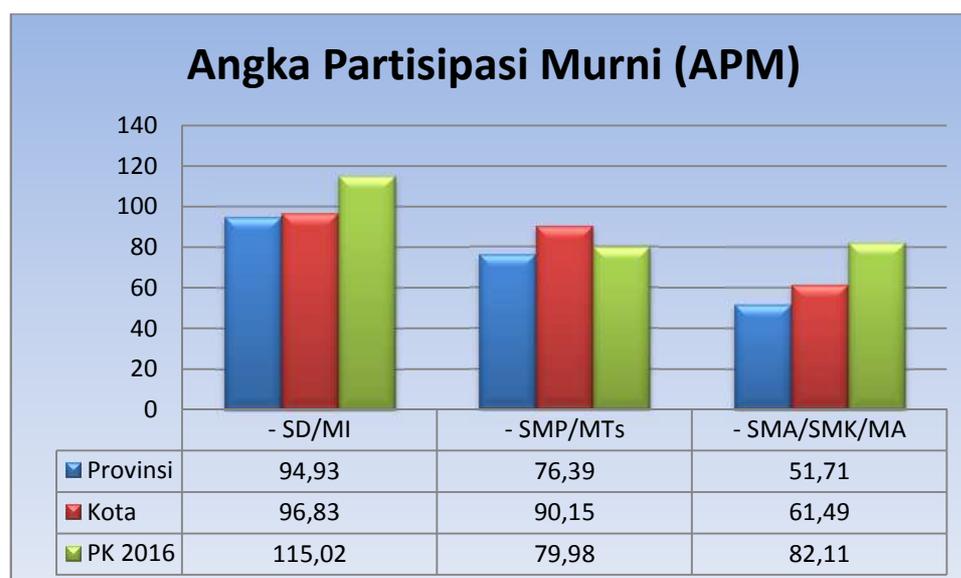
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional

No	INDIKTOR KINERJA	Data PDSPK				PK 2016	
		Provinsi		Kota			
2.1	Angka Partisipasi Kasar						
	- SD/MI	103,68	%	102,49	%	126,52	%
	- SMP/MTs	96,38	%	103,76	%	97,77	%
	- SMA/SMK/MA	69,1	%	83,18	%	94,59	%
2.2	Angka Partisipasi Murni						
	- SD/MI	94,93	%	96,83	%	115,02	%
	- SMP/MTs	76,39	%	90,15	%	79,98	%
	- SMA/SMK/MA	51,71	%	61,49	%	82,11	%



Grafik 3. 13 Perbandingan APK PK 2016 dengan Data PDSPK

Dapat dilihat dari grafik perbandingan APK antara PK 2016 dengan data yang dikeluarkan PDSPK tahun 2016 bahwa nilai APK untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA pada PK 2016 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas pendidikan kota Banjarmasin selaku penanggungjawab urusan pendidikan menjalankan program dan kegiatan yang dianggap mampu untuk meningkatkan APK kota Banjarmasin, sehingga dengan kerja keras seluruh komunitas pendidikan yang ada baik itu pegawai dinas pendidikan, guru dan pemerintah kota Banjarmasin selaku pemegang kebijakan dapat mengejar ketertinggalan APK jenjang SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA pada akhir masa RPJMD Kota Banjarmasin dengan selisih yang cukup besar dengan APK provinsi dan nasional.



Grafik 3. 14 Perbandingan APM PK 2016 dengan Data PDSPK

Dari grafik perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) PK 2016 dengan Data capaian Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dapat dilihat realisasi Perjanjian Kinerja 2016 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin lebih tinggi jika dibandingkan dengan data APM dari PDSPK untuk jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA, sedangkan untuk APM tingkat Kota dari data PDSPK untuk jenjang SMP/MTs masih tertinggal 10,17% dengan data realisasi

Perjanjian Kinerja 2016, dimana ketertinggal tersebut menjadi pemacu kerja keras Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan menerapkan Program dan Kegiatan secara stimultan untuk meningkatkan APM jenjang SMP/MTs.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karenanya, analisis masalah lingkungan internal dan eksternal sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Banjarmasin secara bersinambungan, efektif-efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan SPM dan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Banjarmasin untuk mendukung dan memantapkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan

IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2016

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistikintegratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, harus disertai dengan perluasan akses dan peningkatan

mutu pendidikan menengah. Oleh karena itu penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di satuan pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak, khususnya yang terkait dengan sarana prasarana dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bermutu.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam program wajib belajar 9 tahun.

3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

4. Program Pendidikan Menengah

Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu

Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah.

Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia ke depan.

5. Program Pendidikan Non Formal

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/ lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan kepala sekolah, peningkatan peran

orangtua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Peningkatan mutu pada pendidikan berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 90,15 persen untuk keuangan sehingga ada kenaikan sebesar 2,63% dari tahun 2015, hal ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh warga dinas pendidikan baik dari level eselon tertinggi sampai level staf/pelaksana dengan kekompakan dan tanpa mengenal lelah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 68.252.844.000,00 dimana angka serapannya sebesar Rp. 61.529.844.000,00 dengan silpa sebesar Rp. 6.723.754.275,00 Untuk

lebih detail serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2016

NO	URAIAN KEGIATAN	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.773.943.507	3,757,940,322	84,33%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.244.159.150	1,590,549,100	84,31%
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.016.827.500	5,413,850	90,67%
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	42.737.805.402	3,013,600,000	93,35%
5	Program Pendidikan Menengah	3.199.500.708	40,190,043,811	83,61%
6	Program Pendidikan Non Formal	881.336.000	4,796,100,500	93,67%
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.217.870.908	685,010,625	80,79%
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	457.646.550	3,200,765,000	40,39%
Jumlah		66,037,153,050	61.529.089.725	90,15%

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) didunia pendidikan. LKj Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 8 (Delapan) program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2016 adalah sebesar 95,01% Dari sebanyak 19 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dengan rincian sebanyak 15 Indikator Kinerja capaian kinerjanya sangat berhasil, 2 indikator Kinerja capaian kinerjanya Berhasil dan 2 Indikator Kinerja capaian kinerjanya kurang berhasil.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2016 adalah sebesar 90,15%. Dari sebanyak 8 program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebanyak 3 program dengan capaian kinerja keuangannya sangat berhasil, 4 program dengan capaian kinerja keuangannya berhasil dan 1 program dengan capaian kinerja keuangannya kurang berhasil.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain pengimplementasian kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebaran guru yang belum merata. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas Komprehensif dapat terwujud.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 90,15 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.68.252.844.000,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan di Kota Banjarmasin sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pendidikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bias dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian

kinerjanya. Memang masih terdapat indikator kinerja yang realisasi capaian kinerjanya masih rendah hanya 50%, akan tetapi secara keseluruhan capaian kinerja untuk keempat sasaran yang ada sudah sangat tinggi dengan capaian hampir mencapai 100% bahkan ada sasaran kinerja yang capaiannya 141,18% hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah sangat berhasil dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 90,15%. Pada masa yang akan datang diharapkan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan semakin matang dengan segala indikator yang lebih smart.

Lampiran-Lampiran

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN
2016**